



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI
YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13

Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

selanjutnya diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini.

- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.
- (3) Perguruan tinggi (PT) dapat memilih Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang akan melakukan akreditasi (Akreditasi) bagi program studi (Program Studi) yang di dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini tercakup dalam lebih dari 1 (satu) LAM berdasarkan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) Program Studi tersebut dengan LAM yang akan melakukan Akreditasi, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.

Pasal 2

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Bagi Program Studi yang dialihkan akreditasinya dari BAN-PT ke LAM setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:
 - a. Proses Akreditasi Program Studi (APS) akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
 - b. BAN-PT dan LAM mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT masih dapat mengusulkan APS kepada BAN-PT yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS dan ketentuan yang berlaku di BAN-PT;
 - d. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS tanpa pengajuan, atau pemantauan dan evaluasi mutu Program Studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
 - e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan Akreditasi diterbitkan;
 - f. Apabila PT keberatan atas keputusan Akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan

pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;

- g. Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi melaksanakan APS bagi Program Studi tersebut dan semua APS bagi Program Studi tersebut dilaksanakan oleh LAM.
- (2) Seluruh ketentuan peralihan pada ayat (1) kecuali huruf d berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Program Studi yang beralih dari suatu LAM ke LAM lain berdasarkan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) Program Studi tersebut dengan LAM lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3).
- (3) Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi Program Studi yang telah ditetapkan tercakup dalam LAM sebelum berlakunya Peraturan BAN-PT ini.

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.
- (3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024
tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

No.	Program studi	Lembaga Akreditasi Sebelum Peraturan BAN- PT Nomor 21 Tahun 2024 berlaku	Lembaga Akreditasi Setelah Peraturan BAN- PT Nomor 21 Tahun 2024 berlaku
1	Administrasi	BAN-PT	LAMSPAK
2	Administrasi Asuransi Aktuaria	BAN-PT	LAMSPAK
3	Administrasi Bisnis	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
4	Administrasi Bisnis Internasional	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
5	Administrasi Bisnis Otomatis	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
6	Administrasi Bisnis Sektor Publik	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
7	Administrasi Bisnis Terapan	BAN-PT	LAMSPAK, LAMEMBA
8	Administrasi dan Kebijakan Publik	BAN-PT	LAMSPAK
9	Administrasi Fiskal	BAN-PT	LAMSPAK
10	Administrasi Hotel	BAN-PT	LAMSPAK
11	Administrasi Jaringan Komputer	BAN-PT	LAM INFOKOM
12	Administrasi Keimigrasian	BAN-PT	LAMSPAK
13	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	BAN-PT	LAMSPAK
14	Administrasi Keuangan	BAN-PT	LAMSPAK
15	Administrasi Keuangan dan Perbankan	BAN-PT	LAMSPAK
16	Administrasi Keuangan Publik	BAN-PT	LAMSPAK
17	Administrasi Logistik	BAN-PT	LAMSPAK
18	Administrasi Negara	BAN-PT	LAMSPAK
19	Administrasi Niaga	BAN-PT	LAMSPAK
20	Administrasi Pajak	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
21	Administrasi Pembangunan	BAN-PT	LAMSPAK
22	Administrasi Pembangunan Negara	BAN-PT	LAMSPAK
23	Administrasi Pemerintah Daerah	BAN-PT	LAMSPAK
24	Administrasi Pemerintahan	BAN-PT	LAMSPAK
25	Administrasi Pemerintahan Daerah	BAN-PT	LAMSPAK
26	Administrasi Perkantoran	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA

27	Administrasi Perkantoran Digital	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
28	Administrasi Perpajakan	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
29	Administrasi Pertahanan	BAN-PT	LAMSPAK
30	Administrasi Publik	BAN-PT	LAMSPAK
31	Agama dan Budaya	BAN-PT	LAMSPAK
32	Agama dan Lintas Budaya	BAN-PT	LAMSPAK
33	Agen Intelijen	BAN-PT	LAMSPAK
34	Analisis Intelijen	BAN-PT	LAMSPAK
35	Antropologi	BAN-PT	LAMSPAK
36	Antropologi Budaya	BAN-PT	LAMSPAK
37	Antropologi Sosial	BAN-PT	LAMSPAK
38	Arkeologi	BAN-PT	LAMSPAK
39	Bisnis Maritim	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
40	Demografi dan Pencatatan Sipil	BAN-PT	LAMSPAK
41	Diplomasi Pertahanan	BAN-PT	LAMSPAK
42	Film	BAN-PT	LAMSPAK
43	Film dan Televisi	BAN-PT	LAMSPAK
44	Hubungan Internasional	BAN-PT	LAMSPAK
45	Hubungan Masyarakat	BAN-PT	LAMSPAK
46	Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital	BAN-PT	LAMSPAK
47	Ilmu Administrasi	BAN-PT	LAMSPAK
48	Ilmu Administrasi Bisnis	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
49	Ilmu Administrasi Fiskal	BAN-PT	LAMSPAK, LAMEMBA
50	Ilmu Administrasi Negara	BAN-PT	LAMSPAK
51	Ilmu Administrasi Niaga	BAN-PT	LAMSPAK
52	Ilmu Administrasi Publik	BAN-PT	LAMSPAK
53	Ilmu Antropologi	BAN-PT	LAMSPAK
54	Ilmu Hubungan Internasional	BAN-PT	LAMSPAK
55	Ilmu Hubungan Masyarakat	BAN-PT	LAMSPAK
56	Ilmu Informasi dan Perpustakaan	BAN-PT	LAMSPAK
57	Ilmu Kependudukan & Ketenagakerjaan	BAN-PT	LAMSPAK
58	Ilmu Kepolisian	BAN-PT	LAMSPAK
59	Ilmu Kesejahteraan Sosial	BAN-PT	LAMSPAK
60	Ilmu Komunikasi	BAN-PT	LAMSPAK

61	Ilmu Komunikasi Buddha	BAN-PT	LAMSPAK
62	Ilmu Komunikasi Hindu	BAN-PT	LAMSPAK
63	Ilmu Pemerintahan	BAN-PT	LAMSPAK
64	Ilmu Penyuluhan Pembangunan	BAN-PT	LAMSPAK
65	Ilmu Pertahanan	BAN-PT	LAMSPAK
66	Ilmu Politik	BAN-PT	LAMSPAK
67	Ilmu Sosial	BAN-PT	LAMSPAK
68	Ilmu Sosiologi	BAN-PT	LAMSPAK
69	Informasi Perpustakaan Kearsipan	BAN-PT	LAMSPAK
70	Intelijen Medik	BAN-PT	LAMSPAK, LAM-PTKes
71	Intelijen Teknologi	BAN-PT	LAMSPAK, LAM Teknik
72	Jender dan Pembangunan	BAN-PT	LAMSPAK
73	Jurnalistik	BAN-PT	LAMSPAK
74	Jurnalistik Islam	BAN-PT	LAMSPAK
75	Kajian Arab	BAN-PT	LAMSPAK
76	Kajian ASEAN	BAN-PT	LAMSPAK
77	Kajian Asia	BAN-PT	LAMSPAK
78	Kajian Batak	BAN-PT	LAMSPAK
79	Kajian Belanda	BAN-PT	LAMSPAK
80	Kajian Budaya	BAN-PT	LAMSPAK
81	Kajian Budaya dan Media	BAN-PT	LAMSPAK
82	Kajian Budaya dan Tradisi Lisan	BAN-PT	LAMSPAK
83	Kajian Budaya Timur Tengah	BAN-PT	LAMSPAK
84	Kajian Bugis	BAN-PT	LAMSPAK
85	Kajian Film Televisi dan Media	BAN-PT	LAMSPAK
86	Kajian Gender	BAN-PT	LAMSPAK
87	Kajian Ilmu Kepolisian	BAN-PT	LAMSPAK
88	Kajian Indonesia	BAN-PT	LAMSPAK
89	Kajian Inggris	BAN-PT	LAMSPAK
90	Kajian Intelijen	BAN-PT	LAMSPAK
91	Kajian Jawa	BAN-PT	LAMSPAK
92	Kajian Jepang	BAN-PT	LAMSPAK
93	Kajian Jerman	BAN-PT	LAMSPAK
94	Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja	BAN-PT	LAMSPAK

95	Kajian Korea	BAN-PT	LAMSPAK
96	Kajian Minangkabau	BAN-PT	LAMSPAK
97	Kajian Perancis	BAN-PT	LAMSPAK
98	Kajian Perempuan	BAN-PT	LAMSPAK
99	Kajian Slavia	BAN-PT	LAMSPAK
100	Kajian Strategik dan Global	BAN-PT	LAMSPAK
101	Kajian Sunda	BAN-PT	LAMSPAK
102	Kajian Terorisme	BAN-PT	LAMSPAK
103	Kajian Timur Tengah	BAN-PT	LAMSPAK
104	Kajian Timur Tengah dan Islam	BAN-PT	LAMSPAK
105	Kajian Tiongkok atau Sinologi	BAN-PT	LAMSPAK
106	Kajian Wilayah Amerika	BAN-PT	LAMSPAK
107	Kajian Wilayah Eropa	BAN-PT	LAMSPAK
108	Kajian Wilayah Timur Tengah Islam	BAN-PT	LAMSPAK
109	Keamanan dan Intelijen Siber	BAN-PT	LAMSPAK
110	Keamanan Ekonomi dan Intelijen Keuangan	BAN-PT	LAMSPAK
111	Keamanan Maritim	BAN-PT	LAMSPAK
112	Kearsipan	BAN-PT	LAMSPAK
113	Kearsipan dan Informasi Digital	BAN-PT	LAMSPAK
114	Kearsipan Digital	BAN-PT	LAMSPAK
115	Kebijakan Pemerintahan	BAN-PT	LAMSPAK
116	Kebijakan Pendidikan	BAN-PT	LAMSPAK
117	Kebijakan Publik	BAN-PT	LAMSPAK
118	Kebijakan Publik dan Governansi	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
119	Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan	BAN-PT	LAMSPAK
120	Kependudukan	BAN-PT	LAMSPAK
121	Kependudukan dan Lingkungan Hidup	BAN-PT	LAMSPAK
122	Kepolisian	BAN-PT	LAMSPAK
123	Kesejahteraan Sosial	BAN-PT	LAMSPAK
124	Keuangan Publik	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
125	Komunikasi	BAN-PT	LAMSPAK
126	Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat	BAN-PT	LAMSPAK
127	Komunikasi dan Penyiaran Islam	BAN-PT	LAMSPAK
128	Komunikasi Digital dan Media	BAN-PT	LAMSPAK

129	Komunikasi Massa	BAN-PT	LAMSPAK
130	Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan	BAN-PT	LAMSPAK
131	Komunikasi Penerbangan	BAN-PT	LAMSPAK
132	Komunikasi Penyiaran Islam	BAN-PT	LAMSPAK
133	Kriminologi	BAN-PT	LAMSPAK
134	Manajemen Administrasi Perkantoran	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
135	Manajemen dan Administrasi Logistik	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
136	Manajemen dan Kebijakan Publik	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
137	Manajemen Informasi Komunikasi	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
138	Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
139	Manajemen Keuangan Sektor Publik	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
140	Manajemen Komunikasi	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
141	Manajemen Pembangunan	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
142	Manajemen Pembangunan Daerah	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
143	Manajemen Pemerintahan	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
144	Manajemen Pertahanan	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
145	Manajemen Pertahanan Matra Laut	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
146	Manajemen Pertahanan Matra Laut Aspek Darat	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
147	Manajemen Produksi Film Video dan TV	BAN-PT	LAMSPAK
148	Manajemen Produksi Media	BAN-PT	LAMSPAK
149	Manajemen Rekod dan Arsip	BAN-PT	LAMSPAK
150	Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
151	Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
152	Media dan Komunikasi	BAN-PT	LAMSPAK
153	Misiologi dan Komunikasi Kristen	BAN-PT	LAMSPAK
154	Pekerja Sosial	BAN-PT	LAMSPAK
155	Pekerjaan Sosial	BAN-PT	LAMSPAK
156	Pembangunan dan Pemberdayaan	BAN-PT	LAMSPAK
157	Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
158	Pembangunan Masyarakat Desa	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
159	Pembangunan Pedesaan dan Ekonomi Masyarakat	LAMEMBA	LAMSPAK, LAMEMBA
160	Pembangunan Sosial	BAN-PT	LAMSPAK
161	Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan	BAN-PT	LAMSPAK

162	Pembangunan Wilayah	BAN-PT	LAMSPAK
163	Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	BAN-PT	LAMSPAK
164	Pemikiran Politik Islam	BAN-PT	LAMSPAK
165	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	BAN-PT	LAMSPAK
166	Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup	BAN-PT	LAMSPAK
167	Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi	BAN-PT	LAMSPAK, LAM INFOKOM
168	Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan	BAN-PT	LAMSPAK
169	Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan	BAN-PT	LAMSPAK
170	Pengkajian Amerika	BAN-PT	LAMSPAK
171	Penyiaran	BAN-PT	LAMSPAK
172	Penyiaran Konten Digital	BAN-PT	LAMSPAK
173	Penyiaran Multimedia	BAN-PT	LAMSPAK
174	Penyiaran Radio dan Televisi	BAN-PT	LAMSPAK
175	Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan	BAN-PT	LAMSPAK
176	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	BAN-PT	LAMSPAK
177	Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat	BAN-PT	LAMSPAK
178	Perencanaan dan Kebijakan Publik	BAN-PT	LAMSPAK
179	Perencanaan Pembangunan	BAN-PT	LAMSPAK
180	Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	BAN-PT	LAMSPAK
181	Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan	BAN-PT	LAMSPAK
182	Periklanan	BAN-PT	LAMSPAK
183	Periklanan Kreatif	BAN-PT	LAMSPAK
184	Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	BAN-PT	LAMSPAK
185	Perpustakaan	BAN-PT	LAMSPAK
186	Perpustakaan dan Ilmu Informasi	BAN-PT	LAMSPAK
187	Perpustakaan dan Informasi	BAN-PT	LAMSPAK
188	Perpustakaan dan Kearsipan	BAN-PT	LAMSPAK
189	Perpustakaan dan Sains Informasi	BAN-PT	LAMSPAK
190	Perpustakaan Digital	BAN-PT	LAMSPAK
191	Politik dan Pemerintahan	BAN-PT	LAMSPAK
192	Politik Indonesia Terapan	BAN-PT	LAMSPAK

193	Politik Islam	BAN-PT	LAMSPAK
194	Politik Pemerintahan	BAN-PT	LAMSPAK
195	Praktik Perpolisian Tata Pamong	BAN-PT	LAMSPAK
196	Produksi Film dan Televisi	BAN-PT	LAMSPAK
197	Produksi Media	BAN-PT	LAMSPAK
198	Rehabilitasi Sosial	BAN-PT	LAMSPAK
199	Sains Komunikasi	BAN-PT	LAMSPAK
200	Sosiologi	BAN-PT	LAMSPAK
201	Sosiologi Agama	BAN-PT	LAMSPAK
202	Sosiologi Pedesaan	BAN-PT	LAMSPAK
203	Strategi Pertahanan Darat	BAN-PT	LAMSPAK
204	Strategi Pertahanan Laut	BAN-PT	LAMSPAK
205	Strategi Pertahanan Udara	BAN-PT	LAMSPAK
206	Studi Kebijakan	BAN-PT	LAMSPAK
207	Studi Kebijakan Publik	BAN-PT	LAMSPAK
208	Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BAN-PT	LAMSPAK
209	Studi Pembangunan	BAN-PT	LAMSPAK
210	Studi Pemerintahan	BAN-PT	LAMSPAK
211	Studi Pertahanan	BAN-PT	LAMSPAK
212	Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan	BAN-PT	LAM INFOKOM
213	Televisi dan Film	BAN-PT	LAMSPAK
214	Wawasan Pertahanan Nasional	BAN-PT	LAMSPAK